

# PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI INDONESIA

FX. SUGIYANTO

## Abstract

*Competitiveness is a key factor in a global market. Not only firms have to raise their competitiveness, but also nations. Therefore competitiveness can be seen both in the micro and macro perspective. In the macro perspective, the ability of those nations to create employment and raise productivity of their resources represent the competitiveness of nations. While in the micro perspective, competitiveness of a firm is represented by a relative cost comparative. Firms have to generate efficient cost in their production to raise their competitiveness. There are a lot of attributes determine competitiveness; resources, domestic demand, related industries, strategy, structure and competitive conditions in domestic market. Among ASEAN countries, the competitiveness of Indonesia is the weaker. It is important for Indonesia to conduct some policies to enforce all those attributes determining competitiveness in the more liberalized economy.*

**Keywords:** *Competitiveness, determinants of competitiveness, liberalized economy.*

## Pendahuluan

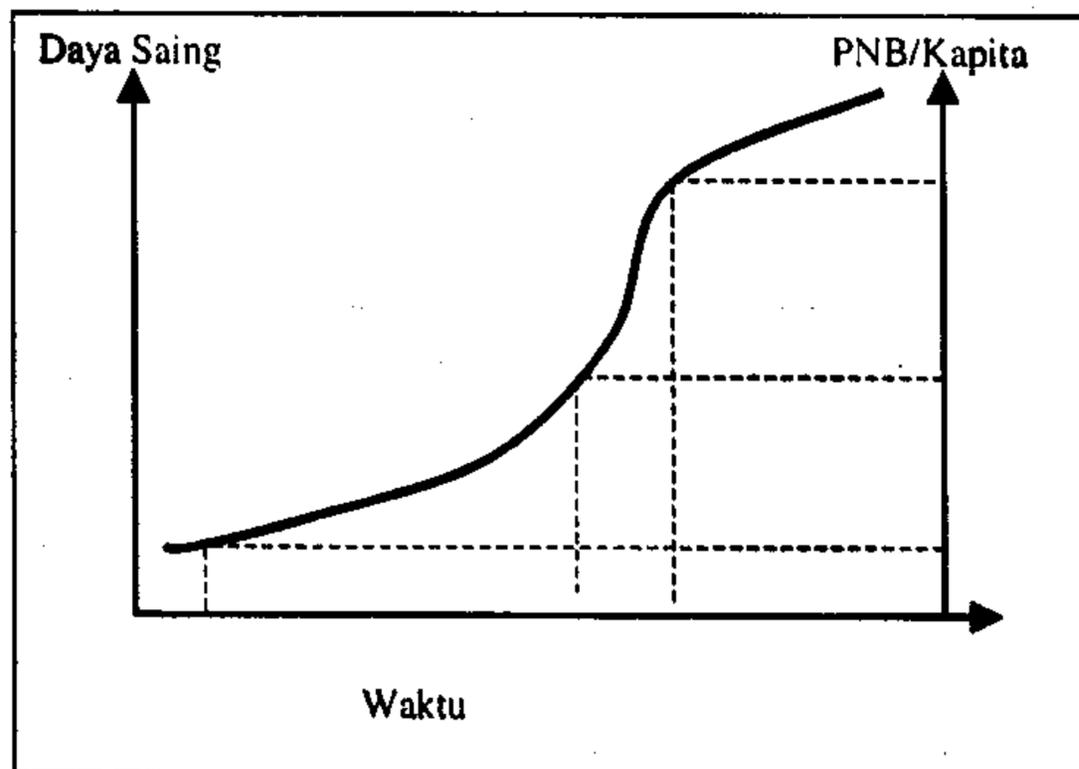
Daya saing (*competitiveness*) telah menjadi satu kunci, baik bagi masyarakat suatu perekonomian maupun individu dalam suatu tatanan ekonomi lintas negara. Bukan hanya perusahaan yang melakukan restrukturisasi atau membentuk jaringan aliansi untuk dapat bersaing, tetapi juga pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian dan menarik investasi ke dalam. Dengan demikian, yang harus bersaing bukan hanya perusahaan, tetapi juga pemerintahan sebuah negarapun harus melakukannya. Karena itu pula, daya saing tersebut dapat dipandang dari dua perspektif yakni mikro perusahaan dan makro suatu perekonomian. Perbedaan perspektif ini tentunya mengharuskan adanya perbedaan dalam ukuran dan indikator yang digunakan untuk melihat daya saing tersebut. Selain itu, daya saing tersebut juga harus ditempatkan dalam konteks kompetitif, dalam arti dia harus ditempatkan dalam konteksnya dengan perusahaan dan atau negara lain.

Daya saing adalah suatu konsep mekanisme untuk mempertimbangkan sekelompok indikator luar negeri yang menekankan pada kinerja relatif antar negara. Dalam perspektif makro, kemakmuran suatu negara; sebagai indikator kinerja suatu perekonomian tergantung pada kemampuan negara tersebut dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan riil penduduknya (Lawton, 1999). Porter (1990) merumuskan daya saing tersebut sebagai kemakmuran ekonomi, dan hal ini sangat tergantung pada produktivitas penduduk suatu bangsa. Karena itu, produktivitas dipandang sebagai determinan utama jangka panjang bagi kenaikan standar hidup suatu bangsa. Sedang dalam perspektif mikro, indikator daya saing suatu perusahaan dilihat dari tingkat *harga relatif*. Tingkat harga relatif yang semakin rendah, menunjukkan tingkat daya saing perusahaan yang semakin tinggi. Pengertian relatif

ini harus diartikan dalam kaitanya dengan berbagai atribut yang membentuk suatu macam produk, baik itu kualitas, desain, harga, kenyamanan dan atribut-atribut lainnya. Dengan demikian, esensi dari daya saing adalah biaya yang relatif rendah. Karena itu pula, esensi peningkatan daya saing adalah penurunan ongkos.

Dilihat dari esensinya tersebut, maka tidaklah bertentangan antara perspektif daya saing dalam artian mikro dengan daya saing dalam artian makro, walaupun indikator dan ukurannya berbeda. Namun dari segi orientasi tidaklah beda, dan saling melengkapi. Daya saing juga bersifat dinamis. Semakin tinggi daya saing perekonomian suatu negara, semakin tinggi pula kemakmuran penduduk negara tersebut. Demikian pula, semakin tinggi daya saing suatu perusahaan, kinerja perusahaan bersangkutan juga semakin baik. Hubungan antara daya saing dan kemakmuran tersebut ditunjukkan dalam Gambar-1.

**Gambar 1**  
**Hubungan Daya Saing Dengan Pendapatan Perkapita**



Dalam konteks ekonomi Indonesia, perhatian terhadap daya saing tersebut sangat relevan, setidaknya jika daya saing tersebut dikaitkan dengan dua hal berikut ini. *Pertama* berkaitan dengan arus liberalisasi perdagangan dunia. Ratifikasi persetujuan perdagangan multilateral yang tertuang dalam World Trade Organization (WTO) dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya, mempunyai konsekuensi bahwa Indonesiapun harus taat terhadap aturan-aturan didalamnya. Implikasi dari perjanjian tersebut adalah bahwa semua negara harus secara bertahap melakukan pengikisan terhadap proteksi-proteksi perdagangan antar negara. *Kedua*, kondisi internal industri Indonesia secara umum masih tidak efisien. Akibatnya, jika harus memasuki tatanan perdagangan bebas, sangat mungkin perusahaan-perusahaan Indonesia di pasar internasional akan kalah bersaing.

### Indonesia di antara Negara Lain.

Menurut peringkat terakhir dari IMD – *World Competitiveness Yearbook* (2003), Daya saing Indonesia masih berada pada urutan ke-28 dari 30 negara yang berpenduduk di atas 20 juta jiwa; di atas Argentina dan Venezuela. Dengan demikian jelas apabila dibandingkan dengan Negara-negara terdekat seperti ASEAN adalah yang terendah (lihat Tabel 1, juga Lampiran 1).

**Tabel 1**  
**Peringkat Daya Saing Negara-negara ASEAN dan Asia Timur**  
**(Negara Berpenduduk di atas 20 Juta Jiwa, th 2001 -2003)**

No	Negara	2001	2002	2003
1	Indonesia	24	25	28
2	Malaysia	10	6	4
3	Philipina	18	18	22
4	Thailand	14	13	10
5	Korea	10	6	4
6	Cina	12	12	12

Sumber: IMD-Competitiveness Yearbook 2003

Dari Tabel 1, juga diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir ternyata daya saing Indonesia cenderung menurun; sama dengan Philipina, sementara Malaysia dan Thailand cenderung meningkat.

Rendahnya daya saing ekonomi Indonesia tersebut juga tampak dari indeks kinerja Investasi Asing masuk (*Inward FDI Performance Index*). Bahkan Indeks tersebut untuk Indonesia justru negatif, yang berarti justru terjadi *net foreign outflow*. Indeks ini menggambarkan kinerja penurunan relatif atau kenaikan relatif investasi asing di Negara bersangkutan.

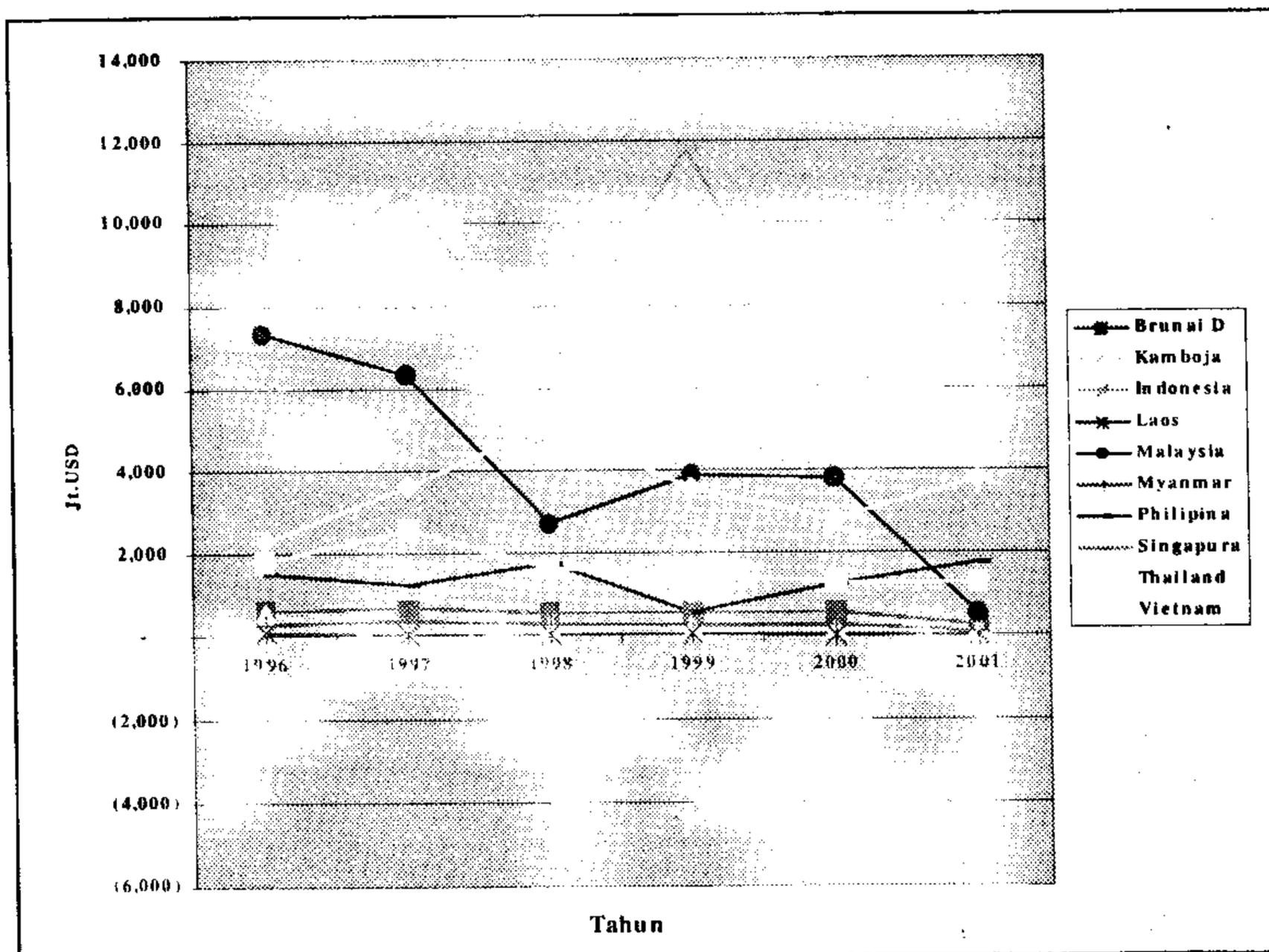
**Tabel 2**  
**FDI Performance Index Th. 1999-2001**

Negara	Ranking	Nilai
Uni Emirat Arab	136	- 0,187
Yaman	137	- 0,203
Indonesia	138	- 0,680
Syria	139	- 0,995
Suriname	140	-1,613

Sumber: UNCTAD, *World Investment report*, 2003

Rendahnya tingkat daya saing perekonomian Indonesia tersebut menyebabkan investasi luar negeri ke Indonesia sangat rendah, bahkan menurun sejak tahun 1997 (Gambar 2). Tentunya ada banyak variabel yang menyebabkan investasi luar negeri yang rendah tersebut. Karena itu, salah satu strategi untuk menarik investasi ke Indonesia tersebut adalah dengan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

**Gambar 2**  
**Perkembangan Investasi**



Selain investasi luar negeri yang menurun, rendahnya tingkat daya saing perekonomian Indonesia tampak dari relatif rendahnya tingkat ekspor. Dibanding Negara-negara sekawasan ASEAN saja, tingkat ekspor Indonesia masih relatif lebih kecil dibanding Singapura, Malaysia dan Thailand (Lihat Lampiran 2). Hanya dengan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia akan meningkat dan mampu bersaing dengan Negara-negara lain.

### Mengapa Harus Daya Saing

Peningkatan daya saing perekonomian menjadi semakin relevan ketika tatanan perekonomian dunia semakin terbuka dan mengarah pada sistem ekonomi pasar sebagai sistem dominan dalam hubungan antar negara. Dipacu oleh peranan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang roh utamanya adalah liberalisasi perekonomian dunia, persaingan antar negara menjadi semakin ketat baik dalam transaksi ekspor-impor, aliran investasi maupun transaksi pasar uang.

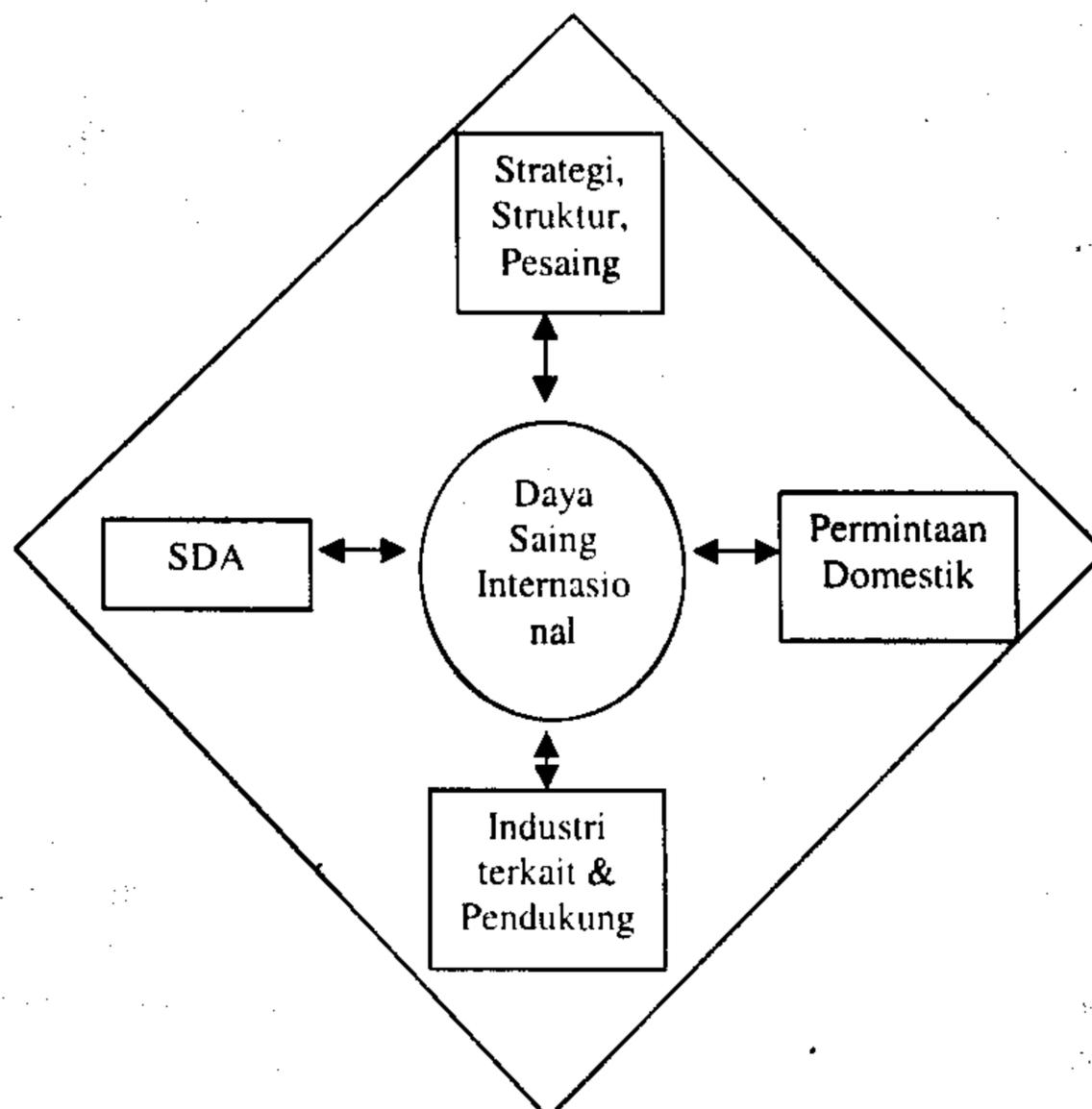
Terbentuknya berbagai kerjasama ekonomi regional seperti AFTA, NAFTA; Uni Eropa selain merupakan anti tesis terhadap globalisasi adalah juga merupakan praktik kerjasama ekonomi yang senafas dengan liberalisasi. Karena itu, berbagai bentuk kerjasama ekonomi regional tersebut akan menciptakan persaingan yang lebih ketat pada kawasan bersangkutan. Dan karena globalisasi akan mendorong pasar kearah kesamaan harga, maka strategi untuk dapat memperoleh pasar harus mendasarkan pada strategi *cost management*. Inilah esensi daya saing tersebut; yakni harga relatif murah yang terbangun dari suatu proses keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

### Determinan Daya Saing

Untuk mencapai keberhasilan dalam bersaing, suatu bangsa haruslah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam bentuk biaya yang lebih rendah (*cost leadership*) atau membangun keunikan melalui diferensiasi produk (*product differentiation*) (Porter,1990). Perlu dipahami lebih dulu, perilaku (*nature*) kompetisi dan sumber-sumber keunggulan kompetitif akan berbeda antar industri dan bahkan antar segmen industri. Disamping itu, kompetitor global sering melakukan aktivitas dalam rantai nilai di luar negara mereka. Ini berarti merekapun telah mengubah karakter mereka yang tidak lagi mendasarkan pada keunggulan dalam "*homebase*"-nya. Kompetitor Global biasanya juga telah melakukan dan secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan inovasi, dan secara agresif menciptakan pasar-pasar baru.

Mengapa sebuah bangsa dapat mencapai sukses internasional? Hal tersebut terletak pada empat atribut utama yang mempengaruhi lingkungan dimana industri tersebut bersaing (Gambar-3)

**Gambar 3**  
**Empat Atribut Penentu Daya Saing**



1. *Faktor Produksi*. Keadaan ketersediaan faktor produksi seperti SDA, keadaan tenaga kerja, pengetahuan dan teknologi, modal, infrastruktur, struktur industri faktor produksi akan menentukan daya tawar pemasok faktor produksi dan daya saing suatu bangsa.
2. *Permintaan Domestik*. Tiga atribut permintaan domestik mempunyai pengaruh signifikan terhadap daya saing yaitu komposisi permintaan atau perilaku pembeli, skala dan pola pertumbuhan permintaan domestik, serta mekanisme transmisi permintaan dari dalam ke luar negeri atau internasionalisasi permintaan domestik.
3. *Dukungan industri terkait*. Keberadaan industri pendukung atau yang berhubungan; baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri akan mempengaruhi keunggulan kompetitif suatu industri.
4. *Strategi perusahaan, struktur industri atau pasar dan pesaing*. Kondisi bagaimana perusahaan tersebut dilahirkan, diorganisasikan dan perilaku pesaing domestik akan menentukan daya saing internasional. Tujuan, strategi, cara mengorganisasikan perusahaan sangat bervariasi di antara pesaing baik di dalam negeri maupun di negara-negara pesaing. Cara mengelola perusahaanpun sangat dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan (*circumstances*). Karena itu tidak ada satupun sistem managerial yang secara universal tepat guna (*appropriate*).

### **Cakupan dan Kriteria**

Cukup banyak aspek yang dicakup dalam mengukur daya saing suatu ekonomi. Namun secara umum dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok yakni:

- a. Kinerja Ekonomi; yang mencakup:
  - (1) Perekonomian domestic
  - (2) Perdagangan internasional
  - (3) Investasi internasional
  - (4) Kesempatan kerja
  - (5) Tingkat Harga
- b. Efisiensi Pemerintah
  - (1) Pembiayaan Publik
  - (2) Kebijakan Fiskal
  - (3) Kerangka Kerja Kelembagaan
  - (4) Legislasi bisnis
- c. Efisiensi Bisnis
  - (1) Produktivitas
  - (2) Pasar Kerja
  - (3) Pembiayaan
  - (4) Sikap dan Nilai
- d. Infrastruktur
  - (1) Infrastruktur Dasar
  - (2) Infrastruktur Teknologi
  - (3) Infrastruktur Keilmuan
  - (4) Lingkungan dan Kesehatan
  - (5) Pendidikan

## Daya Saing Ekonomi Indonesia: Sebuah Perjalanan Panjang

Sebagaimana sudah dibahas pada bagian terdahulu, daya saing perekonomian dan industri dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Dalam perspektif mikro, faktor eksternal tersebut adalah semua variabel lingkungan perusahaan berada diluar kemampuan perusahaan atau industri untuk mengendalikannya. Dalam perspektif makro, faktor eksternal tersebut adalah variabel-variabel ekonomi internasional yang sifatnya tidak dapat dikendalikan. Pendekatan analisis terhadap daya saing ekonomi Indonesia yang digunakan dalam studi ini adalah dengan menggunakan pendekatan WEF dengan beberapa variabel tambahan. Variabel-variabel tersebut mencakup instrumen kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan restrukturisasi industri, indikator sosial seperti pendidikan, upah buruh dan demografi seperti struktur usia, angkatan kerja dan pengangguran, serta variabel politik dan hukum.

### a. Kebijakan moneter.

Instrumen-instrumen moneter yang variabel moneter yang akan dibahas dalam hal ini mencakup kinerja tingkat bunga, inflasi dan nilai tukar.

*Tingkat bunga.* Tingkat bunga merupakan *cost of fund* dari investasi yang dibiayai oleh dunia perbankan. Fleksibilitas investasi terhadap tingkat bunga menunjukkan tingkat responsibilitas investasi atau sector riil terhadap perubahan tingkat bunga atau sector moneter. Sejak kebijakan Moneter 1 Juni 1983 (Pakjun 1983) Bank Sentral tidak lagi mengatur tingkat bunga bank umum. Hal ini mempunyai implikasi bahwa tingkat bunga akan ditentukan oleh interaksi yang terjadi di pasar uang. Liberalisasi pasar uang tersebut akan mempunyai dampak positif terhadap daya saing seandainya dunia usaha di sector riil responsive terhadap tingkat bunga. Dengan demikian, dilihat secara institusional kebijakan liberalisasi tersebut merupakan bentuk upaya peningkatan daya saing. Sayangnya, sektor riil di Indonesia tidak responsive terhadap perubahan di sektor moneter (Timothy, 1994. Sugiyanto, 1999). Karena sifatnya yang tidak responsif ini, maka upaya peningkatan daya saing melalui instrumen tingkat bunga menjadi tidak efektif.

*Inflasi.* Dari sisi konsumen, inflasi merupakan faktor pengurang daya beli. Dari sisi produsen dan penjual, inflasi akan menambah biaya; baik biaya produksi maupun biaya distribusi. Inflasi yang meningkat dengan tajam dan pada tingkat yang tinggi jelas menjadi factor penghalang peningkatan daya saing. Terhadap permintaan domestik, inflasi akan cenderung menurunkan permintaan baik dalam *size*-nya maupun pola permintaanya. Karena inflasi juga terjadi sebagai akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi; juga karena kurangnya penawaran, maka inflasi akan menjadi beban dalam bentuk kenaikan harga pokok produksi yang akhirnya juga akan meningkatkan harga relatif produk dan sekaligus dapat menurunkan keuntungan produsen. Kenaikan harga relatif ini akan menurunkan daya saing. Dibanding beberapa negara lain, inflasi di Indonesia relatif masih cukup tinggi (*Word Economic Outlook*, May 2001)

*Nilai Tukar.* Masalah terbesar berkaitan dengan nilai tukar Rupiah adalah ketidakstabilan. Perusahaan memerlukan perencanaan usaha yang "expectable". Nilai tukar yang *volatile* menjadikan perusahaan tidak mampu melakukan perencanaan dengan mantap karena setiap saat perencanaan tersebut dapat berubah. Jadi nilai tukar yang berubah-ubah bisa merusak pasar. Apresiasi dollar yang mencapai lebih dari 300 persen dalam tiga tahun terakhir ini

semestinya dapat dimanfaatkan bagi kenaikan ekspor. Tetapi hal itu tidak terjadi, terutama bagi eksportir pada industri pengolahan. Sedang eksportir produk-produk primer dapat menikmati peluang tersebut. Meningkatnya ekspor tersebut bukan karena daya saing meningkat, melainkan karena perubahan nilai tukar yang cukup besar. Pada industri pengolahan, yang sebagian besar atau sebagian inputnya masih merupakan komponen impor, kenaikan nilai tukar dollar justru meningkatkan beban ongkos. Dan hal ini menjadikan produk-produk manufaktur tersebut menjadi relatif mahal. Sistem nilai tukar fleksibel akan menjadi factor pendorong meningkatnya daya saing seandainya nilai tukar tersebut tidak *volatile*. Keuntungan lain dengan menerapkan sistem nilai tukar mengambang adalah karena sebagian negara partner dagang Indonesia juga menerapkan sistem nilai tukar mengambang.

Berkaitan dengan instrumen moneter ini, variabel kunci untuk meningkatkan daya saing adalah stabilitas kurs dan tingkat kurs Rupiah. Kurs yang stabil akan cenderung tidak mendorong pelarian modal. Dengan kurs yang stabil, Bank Sentral secara bertahap akan dapat menurunkan suku bunga. Disisi lain jika kurs rupiah stabil, inflasi dapat dikendalikan lewat dua jalur, yakni jalur moneter dan jalur distribusi dan penawaran.

#### **b. Kebijakan Fiskal**

Dua instrumen mendasar dalam peningkatan daya saing melalui kebijakan fiskal; yakni penurunan defisit anggaran dan penurunan tingkat pajak atau insentif pajak yang lain. Tetapi, instrumen ini bersifat dikotomis. Defisit anggaran mempunyai dua implikasi yang berlawanan tergantung bagaimana defisit tersebut dibiayai. Jika dibiayai dengan mencetak Rupiah, maka inflasi akan terjadi. Sebaliknya jika defisit ditutup dengan menekan pengeluaran, permintaan akan berkurang. Atau, jika defisit tersebut ditutup dengan menaikkan pajak dan mengurangi subsidi, akibatnya akan lebih parah lagi, yakni penurunan permintaan dan sekaligus inflasi akan naik. Dalam kasus Indonesia, ada langkah yang lebih aman dan sekaligus meningkatkan daya saing yakni menjual asset-aset pemerintah yang ada di BPPN dan menjual BUMN. Insentif pajak akan meningkatkan daya saing. Akan tetapi dalam kasus Indonesia saat ini, hal tersebut sangat sulit dilakukan mengingat justru pemerintah sedang dalam ancaman defisit yang semakin besar.

#### **c. Restrukturisasi Industri**

Strategi substitusi impor yang dikembangkan Indonesia sejak awal Repelita I yang disertai proteksi tinggi dan tidak menyertakan *time horizon* yang jelas telah menyebabkan industri yang dikembangkan Indonesia rentan terhadap persaingan. Di samping itu, strategi pertumbuhan dengan konsep *trickle down effect* yang mengalami kegagalan telah menyebabkan struktur industri Indonesia cenderung oligopolistik. Strukturisasi industri kearah oligopolistik dan monopolistik mendapat momentum kuat ketika secara sosiologis pertumbuhan industri tersebut dipacu oleh "kroniisme" dalam bisnis dan oligarki dalam kekuasaan dan politik. Strukturisasi industri yang oligopolistik tersebut ditandai oleh konsentrasi yang tinggi oleh empat perusahaan terbesar (CR-4) pada industri manufaktur, perdagangan dan perbankan. Memang, sejak tahun 1975 CR-4 di atas 0,75 mulai menurun dari 38,2 persen menjadi 21,8 persen pada tahun 1990 tetapi meningkat lagi menjadi 29,1 persen pada tahun 1993 (Bird, 1996). Industri-industri yang oligopolistik secara alamiah mempunyai karakteristik tidak dapat bekerja secara

efisien, apalagi kalau industri tersebut dilahirkan dari satu proses yang proteksionistik yang dilandaskan pada kepentingan bercokol (*vested interest*).

Kelemahan struktural lain dalam industri Indonesia adalah banyaknya industri *footloose*, sehingga bebas kemana saja untuk dapat memproduksi. Apalagi jika industri tersebut tidak menggunakan basis inputnya di Indonesia. Industri kimia termasuk dalam kategori ini. Industri demikian akan mudah pindah ke negara lain jika tidak mendapat insentif untuk menjalankan operasinya di Indonesia. Banyaknya perusahaan yang ambruk ketika didera krisis ekonomi menunjukkan cukup banyaknya industri *footloose* tersebut.

#### **d. Kualitas Tenaga Kerja dan Struktur Usia Muda**

Upah rendah sudah diragukan sebagai faktor keunggulan komparatif industri Indonesia. Jika upah merupakan pencerminan dari produktivitas tenaga kerja, maka upah yang rendah bisa dipandang sebagai cerminan produktivitas yang rendah. Ketika industri tekstil Indonesia mulai tumbuh, tingkat upah rendah di Indonesia dipandang sebagai keunggulan komparatif bersamaan melubernya (*spill over*) industri dan teknologi tekstil padat karya Korea yang sudah usang di negaranya. Saat ini, ketika India, Bangladesh dan negara-negara Asia Selatan telah muncul sebagai negara penghasil tekstil yang potensial dan bersamaan dengan tuntutan buruh internasional untuk meningkatkan harkat hidup buruh, upah rendah bukan lagi sebagai penjamin keunggulan daya saing, tetapi justru sebaliknya.

Thee Kian Wie (Kian Wie: 2000) menyorot tiga aspek rendahnya daya saing produk industri Indonesia. Tiga aspek tersebut adalah (1) sistem insentif yang tidak mendukung: kebijakan makro ekonomi yang tidak stabil dan sehat, regim perdagangan, kebijakan persaingan dalam negeri yang tidak sehat, (2) kapabilitas yang tidak memadai: mencakup investasi SDM, prasarana dan teknologi, (3) kelembagaan.

Rendahnya skill pekerja selain tercermin dari tingkat pendidikan yang rendah juga tercermin dari usia pekerja yang cenderung mengelompok pada usia muda. Kenyataan ini menggambarkan adanya keterpaksaan pekerja untuk bekerja. Dengan struktur pendidikan pekerja yang relatif rendah, dan struktur usia pekerja adalah pekerja usia muda, maka cukup masuk akal jika tingkat upah relatif rendah.

#### **e. Tingkat Penganggur**

Persoalan terbesar dalam perekonomian Indonesia bukan tingkat pengangguran, melainkan tingkat setengah menganggur yang sangat tinggi. Benar bahwa kenaikan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) ketika ekonomi Indonesia dilanda krisis, meningkatkan jumlah penganggur. Tetapi, tingkat setengah menganggur; yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu jumlahnya cukup besar, yakni sekitar 45 persen. Tekanan terhadap lapangan kerja yang berat inilah yang akan menjadikan kenaikan tingkat upah terhambat.

#### **f. Kelembagaan**

Aspek penegakan hukum merupakan salah satu titik lemah dalam upaya meningkatkan daya saing internasional. Kegagalan dalam melaksanakan hukum secara adil dan terbuka, menjadi sebab gagalnya menuju pada pengelolaan ekonomi dan bisnis yang bersih dan jujur (*good corporate*

*governance*) dan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Praktek bisnis kotor dan pemerintahan yang korup telah menjadikan Indonesia sebagai negara kleptokratif (Sugiyanto, 2000). Ketidakpastian hukum menjadi faktor penentu lemahnya daya saing ekonomi Indonesia.

Birokrasi yang korup dan tidak efisien merupakan faktor kelembagaan lain yang menjadi sebab lemahnya daya saing ekonomi Indonesia. Soal tingkat korupsi ini sudah menjadi lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Dan dalam hal ini, Indonesia telah masuk pada tiga besar negara terkorup di dunia.

### **Memecah Lingkaran Setan**

Lemahnya daya saing ekonomi Indonesia sudah bagaikan lingkaran setan yang sangat sulit dipecahkan, kecuali dengan usaha maha besar (*big push strategy*). Proses yang diyakini akan membawa berkah pemecahan untuk mengatasi lemahnya daya saing tersebut adalah proses demokratisasi ekonomi dan politik. Demokratisasi ekonomi, menempatkan asas keadilan (*justice*) sebagai pengatur mekanisme perekonomian. Dalam mekanisme keadilan, pasar berperan sebagai pengatur sedang pemerintah berperan mengambil porsi dari kegagalan fungsi pasar dan menciptakan kondisi yang memungkinkan pasar bekerja secara *fair*. Peran politik adalah mengatur kekuasaan sehingga keadilan tersebut dapat dicapai.

## Daftar Pustaka

- Bird, Kelly. 1996. "Survey of Recent Development", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Australian National University.
- IMF. 2001. "Word Economic Outlook", May.
- Lawton, Thomas C. 1999. "Evaluating European Competitiveness: Measurements and Model for a Successful Business Environment", *Euoropen Business Journal*: 195-205.
- Porter, Michael E. .1990. "*The Competitive Advantage of Nations*", The Free Press. The Third Evenue New York.
- Sugiyanto. 1999. "Dua Tahun Sistem Nilai Tukar Mengambang", *Media Ekonomi & Bisnis*, FE Undip.
- Sugiyanto, 2000. "Kemandirian dan Otonomi Daerah", *Media Ekonomi & Bisnis* FE Undip.
- Thee Kian Wie, 2000. "Rising Indonesia's Industrial Competitiveness", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol.48. No 1.
- Asean Scretariate: [www.asean.or.id/](http://www.asean.or.id/)
- UNCTAD: [www.unctad.org/](http://www.unctad.org/)
- IMD – World Competitiveness Yearbook: [www.imd.com/](http://www.imd.com/)

## Total ASEAN Trade by Country (1993 - 2001)

Table 1.a. Total ASEAN Import by Country  
(Value in Thousand US \$)

COUNTRY	Export									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	
Brunei Darussalam	487.236.4	1.785.338.7	2.770.982.6	2.493.254.5	2.714.161.7	1.923.654.8	2.340.663.8	2.169.146.7	3.530.445.6	
Cambodia	-	-	-	-	-	-	-	1.367.532.4	1.495.092.6	
Indonesia	36.822.983.9	38.846.158.0	45.417.983.8	53.844.524.3	51.274.309.9	48.847.638.9	48.665.452.1	62.124.016.2	56.317.617.8	
Malaysia	46.316.528.2	55.465.141.0	67.147.824.6	74.246.664.6	77.457.644.2	77.098.632.3	84.287.912.9	98.154.484.3	88.031.608.2	
Myanmar	-	-	-	-	-	-	738.037.6	1.193.845.4	2.218.367.7	
Philippines	11.374.805.1	13.450.186.8	17.394.193.1	19.533.005.5	25.227.702.8	29.496.353.1	35.036.892.5	38.078.250.2	32.150.202.0	
Singapore	74.001.094.0	91.889.549.2	104.618.693.0	117.349.376.5	128.174.286.6	109.802.924.1	114.625.141.6	138.352.460.2	121.686.815.7	
Thailand	37.634.503.7	45.328.373.4	59.347.008.1	55.894.698.7	57.822.032.2	49.481.577.4	56.110.879.5	69.254.044.7	65.117.826.7	
<b>TOTAL</b>	<b>206,637,151.3</b>	<b>246,764,747.1</b>	<b>296,696,685.2</b>	<b>323,361,524.1</b>	<b>342,670,137.4</b>	<b>316,650,780.6</b>	<b>341,804,980.0</b>	<b>410,693,780.1</b>	<b>370,547,976.3</b>	

Table 1.b. Total ASEAN Import by Country  
(Value in Thousand US \$)

COUNTRY	Import									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	
Brunei Darussalam	886.282.0	2.000.404.2	2.132.660.8	4.434.840.9	2.310.687.6	1.276.249.9	1,720,353.2	1,067,609.8	1,309,974.8	
Cambodia	-	-	-	-	-	-	-	1,404,587.4	1,501,986.4	
Indonesia	28.327.755.1	34.783.236.0	40.654.130.8	46.618.480.6	41.679.782.5	27,336,871.4	24,003,281.5	33,514,805.2	30,962,141.1	
Malaysia	44,387,984.5	57,058,244.4	71,439,915.0	75,303,091.8	76,988,284.0	60,976,456.7	63,677,841.5	79,647,467.1	73,097,901.7	
Myanmar	-	-	-	-	-	-	1,883,034.7	2,219,433.6	2,811,431.1	
Philippines	17,597,402.1	21,297,279.2	21,639,948.9	28,392,560.2	35,932,510.5	29,659,886.4	30,742,458.4	31,387,401.5	29,550,810.9	
Singapore	85,227,686.9	97,548,625.2	110,115,340.2	123,411,643.1	135,972,714.3	101,495,868.7	110,997,971.0	134,680,130.9	115,919,038.7	
Thailand	46,883,689.6	54,553,792.5	72,572,801.5	72,445,577.4	63,087,776.9	38,711,551.7	48,318,013.2	61,905,736.8	62,072,285.3	
<b>TOTAL</b>	<b>223,310,800.2</b>	<b>267,241,581.5</b>	<b>318,554,797.2</b>	<b>350,606,194.0</b>	<b>355,971,755.8</b>	<b>259,456,884.8</b>	<b>281,342,953.5</b>	<b>345,827,172.3</b>	<b>317,225,570.0</b>	

### **I Economic Performance**

1. Prosperity of a country reflects its past economic performance.
2. Competition governed by market forces improves the economic performance of a country.
3. The more competition there is in the domestic economy, the more competitive the domestic firms are likely to be abroad.
4. A country's success in international trade reflects competitiveness of its domestic economy (provided there are no trade barriers).
5. Openness for international economic activities increases a country's economic performance.
6. International investment allocates economic resources more efficiently worldwide.
7. Export-led competitiveness often is associated with growth-orientation in the domestic economy.

### **II Government Efficiency**

1. State intervention in business activities should be minimized, apart from creating competitive conditions for enterprises.
2. Government should, however, provide macroeconomic and social conditions that are predictable and thus minimize the external risks for economic enterprise.
3. Government should be flexible in adapting its economic policies to a changing international environment.
4. Government should provide adequate and accessible educational resources of quality and develop a knowledge-driven economy.

### **III Business Efficiency**

1. Efficiency, together with ability to adapt to changes in the competitive environment, are managerial attributes crucial for enterprise competitiveness.
2. Finance facilitates value-adding activity.
3. A well-developed, internationally integrated financial sector in a country supports its international competitiveness.
4. Maintaining a high standard of living requires integration with the international economy.
5. Entrepreneurship is crucial for economic activity in its start-up phase.
6. A skilled labor force increases a country's competitiveness.
7. Productivity reflects value-added.
8. The attitude of the workforce affects the competitiveness of a country.

### **IV Infrastructure**

1. A well-developed infrastructure including efficient business systems supports economic activity.
2. A well-developed infrastructure also includes performing information technology and efficient ~~protection~~ protection of the environment.
3. Competitive advantage can be built on efficient and innovative application of existing technologies.
4. Investment in basic research and innovative activity creating new knowledge is crucial for a country in a more mature stage of economic development.
5. Long-term investment in R&D is likely to increase the competitiveness of enterprises.
6. The quality of life is part of the attractiveness of a country.

## **THE GOLDEN RULES OF COMPETITIVENESS**

**I**

**Create a stable and predictable legislative environment.**

**II**

**Work on a flexible and resilient economic structure.**

**III**

**Invest in traditional and technological infrastructure.**

**IV**

**Promote private savings and domestic investment.**

**V**

**Develop aggressiveness on the international markets as well as attractiveness for foreign direct investment.**

**VI**

**Focus on quality, speed and transparency in government and administration.**

**VII**

**Maintain a relationship between wage levels, productivity and taxation.**

**VIII**

**Preserve the social fabric by reducing wage disparity and strengthening the middle class.**

**IX**

**Invest heavily in education, especially at the secondary level, and in the life-long training of the labor force.**

**X**

**Balance the economies of proximity and globality to ensure substantial wealth creation, while preserving the value systems that citizens desire.**